

INOVASI KURIKULUM KEPERIBADIAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN

Zulkifli

zulkifli.abudaud@gmail.com

(Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tangerang)

Abstraks:

Dalam pengembangan kurikulum, banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum mengambil suatu keputusan. Apapun jenis kurikulumnya, pasti memerlukan asas-asas yang harus dipegang. Asas-asas tersebut cukup kompleks dan tidak jarang memiliki hal-hal yang bertentangan sehingga memerlukan seleksi.

Kata Kunci: *Kurikulum, Kepribadian Santri, Di Pondok Pesantren.*

A. Pendahuluan

Salah satu komponen penting pada lembaga pendidikan formal yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan isi pengajaran, mengarahkan proses mekanisme pendidikan, tolok-ukur keberhasilan dan kualitas hasil pendidikan, adalah kurikulum.¹ Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan bagi siswa. Berdasarkan program lembaga pendidikan tersebut siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Perkembangan zaman yang terus berkembang dapat merubah keadaan sosial, ekonomi, budaya bahkan pola pikir masyarakat, maka atas dasar itulah pengembangan kurikulum merupakan keniscayaan bagi institusi pendidikan agar proses dan hasil pendidikan tidak menyimpang dengan harapan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai tuntutan zaman.

Dalam proses pengembangan kurikulum, banyak sekali masalah yang dihadapi, yang memerlukan pertimbangan dan pemecahan tersendiri. Semua masalah

tersebut disebabkan oleh berbagai kondisi yang ada, yang disesuaikan dengan tuntutan dan prinsip kebutuhan yang perlu dipahami. Berbagai masalah yang termasuk dalam masalah umum dapat dikelompokkan menjadi delapan kelompok, yaitu *bidang cakupan (skope), relevansi, keseimbangan, integrasi, sekuens, kontinuitas, artikulasi, dan kemampuan transfer (transfer ability)*. (Hamalik, Dasar Dasar Pengembangan Kurikulum 2008).

Pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh manajemen berdasarkan pertimbangan-pertimbangan multi dimensional, sebagai berikut. (Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum 2008)

1. Manajemen sebagai suatu disiplin ilmu sangat erat kaitannya dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya, seperti filsafat, psikologi, sosial budaya, sosial teknologi.
2. Para pengembang kurikulum mengikuti pola pikir yang sinkron dengan pola dan struktur berfikir dalam manajemen.
3. Implementasi kurikulum sebagai bagian integral dalam pengembangan kurikulum membutuhkan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan prosedur serta pendekatan manajemen.

¹S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 50

4. Pengembangan kurikulum tidak lepas dari kebijakan di bidang pendidikan, yang bersumber dari kebijakan pendidikan nasional.
5. Kebutuhan manajemen di sektor bisnis dan industri.

Dalam pengembangan kurikulum, banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum mengambil suatu keputusan. Apapun jenis kurikulumnya, pasti memerlukan asas-asas yang harus dipegang. Asas-asas tersebut cukup kompleks dan tidak jarang memiliki hal-hal yang bertentangan sehingga memerlukan seleksi. Falsafah yang berlainan, bersifat otoriter, demokrasi, sekuler atau religious, akan memberikan warna yang berbeda dengan kurikulum yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan. Begitu juga apabila dilihat dari perbedaan masyarakat, organisasi bahan yang digunakan dan pilihan psikologi belajar dalam mengembangkan kurikulum tersebut. Secara tidak langsung pengembangan kurikulum harus berasaskan kepada asas filosofis, asas sosiologis, asas psikologis, asas organisatoris. (Idi 2013).

Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi paling signifikan terhadap proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Mulai tahun pelajaran 2013/2014, pemerintah telah memberlakukan kurikulum baru yang disebut dengan kurikulum 2013 pada beberapa sekolah sasaran sebagai *piloting project*. Implementasi kurikulum 2013 didasarkan kepada tantangan internal dan eksternal. Dengan demikian kurikulum 2013 dirancang dengan maksud untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya mereka memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warganegara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

bernegara dan peradaban dunia. (Salim Wazdy 2014).

Namun demikian, kurikulum seringkali tidak mampu mengikuti kecepatan laju perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dan pembenahan kurikulum harus senantiasa dilakukan secara berkesinambungan. Sejak zaman kemerdekaan, kurikulum pendidikan di Indonesia juga senantiasa berubah. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 1999, 2004, dan 2006. (Rohman 2012) Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai perangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Setelah Indonesia merdeka dalam pendidikan dikenal beberapa masa pemberlakuan kurikulum yaitu kurikulum sederhana (1974-1964), pembaharuan kurikulum (1968 dan 1975), kurikulum berbasis keterampilan proses (1984 dan 1994), dan kurikulum berbasis kompetensi (2004 dan 2006) yang disempurnakan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari KTSP agar pendidikan di Indonesia mampu mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, didalamnya mencakup: perencanaan, penerapan dan evaluasi.

B. Landasan Filosofis

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Untuk mengembangkan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, pendidikan berfungsi mengembangkan segenap potensi peserta didik “menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab” (UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Undang-undang ini dirumuskan dengan berlandaskan pada dasar falsafah Negara yaitu Pancasila. Oleh karena itu Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Negara Indonesia menjadi sumber utama dan penentu arah yang akan dicapai kurikulum. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan membawa amanah untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila dalam jiwa peserta didik. Maka UU ini menjadi dasar dibentuknya Kompetensi Inti yang ada dalam Kurikulum 2013 yang mesti dimiliki setiap peserta didik.

C. Landasan Teoritis

Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori “pendidikan berdasarkan standar” dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Kompetensi Lulusan tersebut adalah kualitas minimal lulusan suatu jenjang atau satuan pendidikan. Standar Kompetensi Lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan

keterampilan (PP nomor 19 tahun 2005). Standar Kompetensi Lulusan dikembangkan menjadi Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan yaitu SKL SD, SMP, SMA, SMK.

Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, masyarakat, dan lingkungan dimana yang bersangkutan berinteraksi. Kurikulum dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun kemampuan yang dirumuskan dalam SKL.

1. Konsep Pendekatan Saintifik K13

Kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Dalam pendekatan ilmiah para ilmuwan lebih mengedepankan penalaran induktif ketimbang penalaran deduktif. Penalaran deduktif melihat fenomena umum untuk kemudian menarik simpulan yang spesifik. Sebaliknya penalaran induktif melihat fenomena atau situasi spesifik untuk selanjutnya menarik simpulan secara keseluruhan. Pendekatan saintifik sangat relevan dengan tiga teori belajar yaitu teori Bruner, teori Piaget, dan teori Vygotsky. Teori belajar Bruner disebut juga teori belajar penemuan. Teori Piaget, menyatakan bahwa belajar berkaitan dengan pembentukan skema (struktur kognitif). Vygotsky dalam teorinya menyatakan bahwa pembelajaran terjadi apabila peserta didik menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas itu berada dalam jangkauan kemampuannya.

Pembelajaran tidak langsung adalah pembelajaran yang terjadi selama proses pembelajaran langsung yang dikondisikan menghasilkan dampak pengiring (*nurturant effect*). Pembelajaran tidak langsung berkaitan dengan dengan

pengembangan nilai dan sikap yang terkandung dalam KI-1 dan KI-2. Pengembangan nilai dan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku, dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran kurikulum 2013, semua kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler baik yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat (luar sekolah) dalam rangka mengembangkan moral dan perilaku yang terkait dengan nilai dan sikap (Permendikbud No. 103 Tentang Pembelajaran 2014)

2. Penilaian Autentik (Authentic Assesment)

Penilaian hasil belajar oleh peserta didik memiliki peran antara lain untuk membantu peserta didik mengetahui capaian pembelajaran (learning outcomes). Berdasarkan penilaian hasil belajar oleh pendidik, pendidik dan peserta didik dapat memperoleh informasi tentang kelemahan dan kekuatan pembelajaran dan belajar. Penilaian yang diterapkan pada kurikulum 2013 adalah Penilaian Autentik (*authentic assessment*). Penilaian pada kurikulum sebelumnya (KBK dan KTSP) lebih menekankan pada aspek pengetahuan (kognitif) sedangkan pada Kurikulum 2013, penilaian mencakup semua aspek yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian (Assesmen) sinonimnya adalah pengukuran, pengujian, atau evaluasi. sedangkan Autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliabel. **Penilaian Autentik** adalah pengukuran atas proses dan hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap (afektif), keterampilan (psikomotor), dan Pengetahuan (kognitif).

3. Manfaat Kurikulum 2013

Setiap kurikulum yang diberlakukan di Indonesia memiliki manfaat, masing-masing tergantung pada situasi dan kondisi saat dimana kurikulum tersebut diberlakukan. Beberapa manfaat yang terdapat dari kurikulum 2013, antara lain: (Purwati 2013)

1. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggara pendidikan. Dalam kurikulum 2013 kebijakan pengembangan kurikulum dan pembelajaran beserta system evaluasinya didesentralisasikan ke sekolah dan satuan pendidikan, sehingga pengembangan kurikulum diharapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat secara fleksible. Dengan adanya otonomi daerah sekolah beserta komite dapat merumuskan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Sebagai satuan yang baru, sekolah mungkin mengalami kesulitan dalam menyusun kurikulum 2013, oleh karena itu memungkinkan sekolah berkonsultasi baik secara vertical maupun horizontal. Secara vertical berkonsultasi dengan Dinas pendidikan Kabupaten/kota, sedangkan secara horizontal sekolah bias berkonsultasi dengan dunia industry, kerajinan, pariwisata dan lain-lain agar kurikulum yang dibuat mampu menjawab kebutuhan.
2. Mendorong para guru, kepala sekolah dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Dengan berpijak pada kurikulum 2013 sekolah diberikana keluasaan untuk merancang, mengembangkan dan mengimplemen-tasikan kurikulum sekolah sesuai dengan situasi, kondisi dan keunggulan lokal yang bias dimunculkan oleh sekolah.

3. Guru sebagai fasilitator dalam membantu peserta didik membangun pengetahuan. Pada kurikulum-kurikulum sebelumnya peran guru adalah sebagai instruktur atau selalu member instruksi kepada siswa dan dianggap sebagai orang yang serba tahu segalanya, namun setelah adanya kurikulum 2013 peran tersebut sudah tidak berlaku lagi, karena dalam kurikulum 2013 siswa diposisikan sebagai subjek didik, bukan objek didik dimana siswa lebih dominan dalam proses pembelajaran.

D. Analisis Penyempurnaan Ktsp Menjadi Kurikulum 2013

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan BSNP. Pengembanagan KTSP diserahkan kepada pelaksanaan pendidikan (guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan pendidikan) untuk mengembangkan kompetensi pendidikan (pengetahuan, ketrampilan dan sikap) pada setiap satuan pendidikan, di sekolah dan daerah masing-masing. (Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2008)

Mengingat bahwa penyusunan KTSP diserahkan kepada satuan pendidikan, sekolah, dan daerah masing-masing diasumsikan bahwa guru, kepala sekolah, dewan pendidikan akan sangat bersahabat dengan kurikulum tersebut. Diasumsikan demikian karena mereka terlibat secara langsung dalam proses penyusunannya, dan mereka (guru) yang akan melaksanakannya di dalam kelas, sehingga memahami betul apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran sehubungan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan

tantangan yang dimiliki oleh setiap satuan pendidikan masing-masing.

Keterlibatan guru, kepala sekolah, masyarakat yang tergabung dalam komite sekolah dan dewan pendidikan dalam pengambilan keputusan akan membangkitkan rasa kepemilikan yang tinggi terhadap kurikulum, sehingga mendorong mereka untuk mendayagunakan sumber daya yang ada seefisien mungkin untuk capai hasil yang optimal. Konsep ini didasarkan pada *Self Determination Theory* yang menyatakan bahwa seseorang memiliki kekuasaan dalam dalam pengambilan suatu keputusan, maka akan memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Meskipun kurikulum dapat berubah sesuai kebutuhan zaman, tetapi kurikulum 2013 tidak mengubah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara keseluruhan. Kurikulum 2013 merupakan pembaruan kurikulum KTSP yang telah berlaku.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam PP tersebut dikemukakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (Mulyasa, Kurikulum Yang Disempurnakan 2006).

Dalam konteks pendidikan di pesantren, menurut Nurcholish Madjid, istilah kurikulum tidak dikenal di dunia pesantren, terutama masa prakemerdekaan,

walaupun sebenarnya materi pendidikan sudah ada dan keterampilan itu ada dan diajarkan di pesantren. Kebanyakan pesantren tidak merumuskan dasar dan tujuan pesantren secara eksplisit dalam bentuk kurikulum. Tujuan pendidikan pesantren ditentukan oleh kebijakan Kyai, sesuai dengan perkembangan pesantren tersebut.² Dewasa ini pesantren dihadapkan pada banyak tantangan, termasuk di dalamnya modernisasi pendidikan Islam.

Dalam banyak hal, sistem dan kelembagaan pesantren telah dimodernisasi dan disesuaikan dengan tuntutan pembangunan, terutama dalam aspek kelembagaan yang secara otomatis akan mempengaruhi penetapan kurikulum yang mengacu pada tujuan institusional lembaga tersebut. Selanjutnya, persoalan yang muncul adalah apakah pesantren dalam menentukan kurikulum harus melebur pada tuntutan jaman sekarang, atau justru ia harus mampu mempertahankannya sebagai ciri khas pesantren yang banyak hal justru lebih mampu mengaktualisasikan eksistensinya di tengah-tengah tuntutan masyarakat.

Pondok pesantren adalah pendidikan Islam tradisional pertama di Indonesia. Pesantren merupakan sebuah institusi pendidikan Islam, bertujuan untuk mempelajari, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya aspek moral keagamaan sebagai pedoman perilaku hidup sehari-hari.³ Pesantren adalah bentuk pendidikan tradisional di Indonesia yang sejarahnya telah mengakar secara berabad-abad. Nurcholis Madjid menyebutkan, bahwa pesantren mengandung makna keislaman sekaligus keaslian (indigenous)

²Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 59

³A. Rofiq, dkk. *Pemberdayaan Pesantren*. (Yogyakarta: LKIS, 2005), 1.

Indonesia.⁴ Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (kampus) yang santri-santrinya menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dan kepemimpinan seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatis serta independen dalam segala hal.⁵ Sistem pendidikan tersebut diambil alih dengan mengganti nilai ajarannya menjadi nilai ajaran Islam.⁶

Peran pesantren dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional adalah pada tataran sebagai media untuk melakukan perubahan. Sebab menurut Sudardja Adiwikarta⁷, perubahan itu mencakup pengetahuan, tata nilai, sikap, mentalitas, dan perilaku, maka pendidikan (termasuk pesantren) harus berperan sebagai agen perubahan dan sekaligus mampu mempertahankan nilai-nilai. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus berperan ganda, yakni sebagai pewaris budaya (*agents of conservative*), dan sekaligus sebagai agen perubahan (*agent of change*). Pesantren dapat dikatakan sebagai sebuah institusi pendidikan, hal ini mengingat keberadaannya merupakan bagian yang integral dari institusi pendidikan Islam di Indonesia. Secara operasional pesantren mempunyai independensi untuk mengatur dan mengelola sistem pendidikannya

⁴Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren* (Jakarta:Paramadina, 2006), 107.

⁵Djamaluddin & Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 99.

⁶Djamari, "Nilai-nilai Agama dan Budaya yang Melandasi Interaksi Sosial di Pondok Pesantren Cikadulun Banten", Disertasi Doktor Pendidikan (Bandung: IKIP. 1985), 51-52.

⁷Sudardja Adiwikarta, *Sosiologi Pendidikan: Isyu dan Hipotesis tentang Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat* (Jakarta: Dirjen PT-PPLPTK. 1998), 58.

dalam menggali dan mengembangkan sumber daya yang terdapat di dalamnya. Pondok pesantren sebagai lembaga dakwah, pengkaderan ulama, pengembangan ilmu pengetahuan (khususnya ilmu tentang keagamaan) dan pengembangan masyarakat, telah mempunyai nilai yang tidak kecil dalam ikut andil mendirikan negara republik Indonesia tercinta ini.

Banyak ulama dan santri yang gugur dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Ulama beserta santrinya rela berkorban untuk tanah kelahirannya, sambil memotivasi masyarakat untuk tidak bekerja sama dengan para penjajah. Pada masa awal gerakan mengisi kemerdekaan sampai masa pembaharuan sekarang ini peran pesantren dan ulama' terus meningkat, terutama dalam rangka kerja sama ulama' dan umara' dalam mensukseskan pembangunan pada segala bidang sesuai posisi masing-masing.⁸

Pesantren mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam rangka Islamisasi wilayah nusantara. Hal ini sejalan dengan sejarah tumbuh dan berkembangnya pendidikan Islam di Indonesia. Bentuknya adalah dengan melestarikan ajaran-ajaran Islam melalui transmisi keilmuan para ulama kepada santinya. Reproduksi ulama' dalam memelihara tradisi keagamaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat sangat kental.⁹ Kondisi yang demikian itu telah di buktikannya sampai sekarang seperti yang telah di ketahui bersama. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan, keagamaan dan kemasyarakatan yang sudah sejak lama

dikenal sebagai wahana pengembangan masyarakat (*community development*), telah terungkap dalam sejarah. Dengan orientasi tersebut, pondok pesantren telah mampu menunjukkan partisipasi aktifnya bersama-sama pemerintah dalam mensukseskan program-program pembangunan, lebih dalam hal itu kehidupan beragama dan pencerdasan kehidupan bangsa berjalan dengan harmonis.

Dalam dekade 1980-an terjadilah perubahan yang cukup besar pada keberadaan pesantren sebagai sebuah sistem pendidikan tradisional yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara. Kalau sebelumnya sistem pendidikan pesantren yang terdapat dalam pesantren dikenal sebagai bentuk sistem pendidikan non sekolah, namun kemudian hadir bentuk-bentuk sistem pendidikan sekolah kedalam komunitas pesantren, mulai dari madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, SLTP/SLTA umum, Perguruan Tinggi Keagamaan, bahkan perguruan tinggi Umum, tanpa menggusur sistem kelas bandongan yang selama ini dikenal dan menjadi budaya dalam dunia pesantren.¹⁰ Terjadinya perubahan pada diri pesantren tersebut, merupakan salah satu akibat dari sekian banyaknya sorotan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar Islam, bahkan dari luar negeri yang notabene penduduknya non muslim. Serta adanya bermacam-macam tujuan dan latar belakang dibalik adanya sorotan tersebut, ada yang positif, yaitu dengan tujuan mencari alternatif sistem pendidikan yang ada di pesantren sudah dinilai tidak sesuai dengan tuntutan zaman bahkan dirasa tidak benar, sehingga pesantren merasa terangsang dan merenovasi untuk berbenah diri dengan mencari dan merubah sistem

⁸A. Adi, MA. *Peran Pesantren Dan Santri Menghadapi Era Globalisasi*, dalam majalah Al-Bashiroh, Edisi07, Pasuruan: PP. Darullughah Wadda'wah, Tt, 8.

⁹Lektor: Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi, *Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Ditbim Perta, Depag RI dan PPIM Jakarta, Vol. II, No. 1, 1998, 31.

¹⁰Zubaidi Habillah Asyari, *Moralitas Pendidikan Pesantren*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 1996) 11.

yang dianggap perlu diganti. Lebih lanjut Menteri Agama Republik Indonesia mengatakan bahwa:

Pesantren memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga pendidikan yang meletakkan transfer ilmu-ilmu agama (tafaqquh fidin) dan nilai-nilai Islam (*Islamic Values*).
2. Sebagai lembaga keagamaan yang melakukan kontrol social (Social Control).
3. Sebagai lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa social (Social Engineering).¹¹

Sorotan lain yang ada selain tersebut di atas, adalah sorotan yang bagi peribadi merupakan ungkapan dan penilaian yang terlalu berlebihan, yaitu, pesantren dikatakan sebagai sebuah lembaga pendidikan yang *mubadzir* dan menghambat kemajuan, oleh karenanya hal yang terdapat di pondok pesantren sangat perlu untuk diadakan perombakan total.¹²

Terutama pada sistem pendidikannya, agar lebih sejalan dan dianggap berkesinambungan dengan tujuan yang mencakup semua aspek pendidikan baik aspek spiritual, intelektual maupun emosional. Sehingga out put pondok pesantren benar-benar tidak lagi di pertanyakan mengenai aspek kapasitas keilmuannya, seperti: Imam Nawawi Al-Bantani dan Mahfud At-Termasi, yang dikenal sebagai seorang intelektual pesantren, atau Syekh Kholil Bangkalan, K.H.R. Asnawi Kudus, dan K.H. M. Hasyim Asy'ari, yang sangat populer disebut sebagai ahli strategi pesantren. Mereka adalah sosok dari pondok pesantren, dimana kemasyhuran ilmunya

bukan hanya berkibar di tingkat nasional melainkan berkaliber internasional.¹³

E. Kesimpulan

Santri adalah elemen bangsa yang sedang meniti masa depannya melalui lembaga pesantren. Mereka adalah generasi bangsa yang dinanti-nanti oleh masyarakatnya di kemudian hari saat kembali ke kampung halamannya. Harapan tersebut tentu tidak hanya dielu-elukan oleh masyarakat sekitarnya, melainkan juga bangsa yang sedang terpuruk. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, santri juga sedang dihadapkan pada tantangan masa depan yang kompleks.

Tantangan santri sekarang tentu berbeda dengan santri pada era tahun 1970-an. Meskipun tak kalah beratnya, namun santri zaman dahulu belum terlalu menghadapi tantangan krisis ruhani seperti yang terjadi saat ini. Pada era pasca kemerdekaan hingga menjelang tahun 1990-an, santri dibebani tugas agar ia bisa menjadi contoh di masyarakat sekitarnya.

Di antara mereka termotivasi mondok di pesantren hanya karena ingin beragama secara baik dan benar. Namun, kini santri dihadapkan pada problem globalisasi yang semakin cepat. Mereka harus menguasai ilmu dan teknologi secara baik dan benar sekaligus mampu memberi nilai atas ilmu dan teknologi yang ia kuasai. Godaan duniawi yang menawarkan beragam kemewahan dan keserakahan juga sudah tampak di depan mata.

¹¹Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

¹²Ahmad Zaini, *Dunia Pemikiran Kaum Santri*, (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1995) 85

¹³Abdurrahman Mas'ud, MA., Ph.D, *Intelektual Pesantren; Perhelatan Agama dan Tradisi*, (Terjemah), (Yogyakarta: LkiS, 2004) 4.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren, Perhelatan Agama dan Tradisi* (Terjemah), Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Ahmad Zaini, *Dunia Pemikiran Kaum Santri*, Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1995
- Adi A, MA. *Peran Pesantren Dan Santri Menghadapi Era Globalisasi*, dalam majalah Al- Bashiroh, Edisi 07, Pasuruan: PP. Darullughah Wadda'wah, Tt, 8.
- Akhyak, *Meniti Jalan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003
- Jamal Ma'mur Asmuni, *Dialektika Pesantren dengan Tuntunan Zaman*, dalam Abdul Munir Mulkhan, *Menggagas Pesantren Masa Depan; Perhelatan Agama dan Tradisi*, Yogyakarta: Qirtas, 2003.
- Lektur: Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi, *Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Ditbim Perta, Depag RI dan PPIM Jakarta, Vol. II, No. 1, 1998
- M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Muri Yusuf M., *Statistik Pendidikan*, Padang: Angkasa Raya, 1987.
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Marzuki, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, 1983.
- Nazir Moh. Ph. D, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Poerdarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993
- Riduwan, *Metode dan Keknik Menyusun Tesis*, Bandung: Alfabeta, 2007
- Suyoto, *Pondok Pesantren dalam Alam Pendidikan Nasional*, dalam M. Dawam Raharjo, *Pesantren dan Pembaharuan Hanafi*, Muchlis. 2013. *Moderasi Islam Menangkal Redikalisme Berbasis Agama*. Ciputat. Ikatan Alumni Al-Azhar dan Pusat Studi Al-Quran.
- Hanik, Umi. 2011. *Implementasi Total Quality Management(TQM) dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan*. Semarang. Ra SAIL Mesia Group.
- Irawan Aguk. 2012. *Penakluk Badai Novel Biografi KH Hasyim Asyari*. Depok. Global Media Utama.
- Musthafa, Bachrudin. 2008. *Dari Literasi Dini ke Literasi Teknologi*. Jakarta. Yayasan CREST.
- Muthahhari, Murtadha. 2010. *Pengantar Epistemologi Islam Sebuah Pemetaan dan Kritik Epistemologi Islam atas Paradigma Pengetahuan Ilmiah dan Relevansi Pandangan Dunia* (terj) Muhammad Jawad Bafaqih. Jakarta. Sadra Press.
- Mulyana, Rohmat. 2011. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung. Alfabeta.
- Mutohar, Ahmad dan Anam, Nurul. 2013. *Manifesto Modernisasi Pendidikan Islam & Pesantren*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Naquib Al-Attas, Muhammad. 2011. *Islam dan Sekularisme* (terj.) Khalif Muammar. Bandung. Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Ihsan (PIMPIN).
- Octavia, Lanny, dkk. 2014. *Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren*. Jakarta. Rumah Kitab dan renebook.
- Patoni, Ahmad. 2007. *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*. Yogyakarta. Puataka Pelajar.

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)*
- Rahmat, Abdul. 2013. *Manajemen Pendidikan Islam*. Gorontalo. Ideas.
- Saidan. 2011. *Perbandingan Pemikiran Pendidikan Islam antara Hasan Al-Bana dan Mohammad Natsir*. Jakarta. Kementerian Agama RI.
- Sholeh, Badrus. 2007. *Budaya Damai Komunitas Pesantren*. Jakarta. Pustaka LP3ES, LSAF dan The Asia Foundation.
- Sutrisno. 2006. *Fazlur Rahman Kajian terhadap Metode Efistemologi dan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Umiarso dan Zazin, Nur. 2011. *Pesantren di Tengah Arus Mutu Pendidikan Menjawab Problematika Kontemporer Manajemen Mutu Pesantren*. Semarang. Ra SAIL Mesia Group.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas*
- Tk: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rinika Cipta, 2002.
- Sutrisno Hadi, M.A, *Metodologi Research*, yogyakarta: Andi Ofset, 1991.
- Said Agiel Siradj, ed, *Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren dalam Pesantren Masa Depan*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999
- Saifullah Ma'sum, *Dinamika Pesantren*, Yayasan Islam Al-Hidayah dan Yayasan Saifuddin Zuhri, 1998.
- Zubaidi Habillah Asyari, *Moralitas Pendidikan Pesantren*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 1996

